

# PELAKSANAAN TUGAS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA SAMARINDA

Agus Prihandoyo<sup>1</sup>

## *Abstrak*

*Agus Prihandoyo (2016), Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan di Kota Samarinda di bawah bimbingan Ibu Dr. Rita Kala Linggi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Erwin Resmawan, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda, yang terletak di Jl. Dahlia No. 81 Samarinda, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah purposive sampling, narasumber berasal dari pejabat yang terkait antara lain Kepala Bappeda Kota Samarinda, Kepala Bagian Perencanaan Program, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Evaluasi dan Statistik, dengan analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana.*

*Permasalahan yang dikemukakan penulis dalam penelitian ini ialah Pelaksanaan Tugas Bappeda dalam pembangunan di Kota Samarinda meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, serta Faktor pendukung dan penghambat dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Samarinda.*

*Dari hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Tugas Bappeda Kota Samarinda dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 baru menyelesaikan dokumen perencanaan tersebut di tahun 2015, dokumen penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2015 belum terselesaikan sampai penelitian selesai, dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015 tidak disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Kota Samarinda melainkan berdasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan berdasar atas prioritas utama pembangunan serta yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Samarinda.*

**Kata kunci :** *Tugas, BAPPEDA, Perencanaan Pembangunan*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agusprihandoyo@yahoo.co.id

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala bidang baik politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Namun, seperti negara lain yang pernah dilanda krisis moneter, maka pembangunan tersebut mengalami hambatan-hambatan. Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan pembangunan adalah sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga pelaksanaan pembangunan tidak berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk mencapai semua itu bangsa Indonesia harus melihat kualitas sumber daya dari aparatur pemerintahannya dan masyarakat karena dengan kualitas aparatur dan masyarakat yang baik maka akan tercapai tujuan yang lebih baik.

Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar terwujud dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka di setiap daerah otonom dibentuk suatu badan yang dinamakan Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagaimana halnya di Kota Samarinda. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sangat dibutuhkan supaya perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik karena ada lembaga yang bertanggung jawab secara langsung, peran serta masyarakat sebagai wujud dari keseriusan masyarakat mengawal jalannya pembangunan perlu didukung dengan tersedianya ruang *partisipasi public* dalam memberikan masukan-masukan yang mencerminkan aspirasi masyarakat.

Sesuai dengan Keputusan Presiden No.27 tahun 1980 tentang Pembentukan Bappeda Republik Indonesia dan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut maka Pemerintahan Kota Samarinda didalam melaksanakan pembangunan di daerah, terlebih dahulu direncanakan supaya pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berada pada posisi strategis dalam pemerintahan dan memiliki peran sentral dalam pengelolaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari ujung tombak pelaksana perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibandingkan internal, khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antar instansi pemerintah maupun antar pemerintah dengan swasta/masyarakat. Disisi lain, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah multi sektor sesuai bidang-bidang pembanguan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda tahun 2011-2015 adalah “Terwujudnya Sinergisitas Perencanaan Kota

Samarinda 2015” sebagai bentuk perwujudan visi, maka disusunlah misi pembangunan Kota Samarinda antara lain :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke profesionalisme di Bidang Perencanaan;
2. Meningkatkan dan Memberdayakan masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan;
3. Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu;
4. Menciptakan sistem jaringan perencanaan kota yang sistimatis;
5. Menjalni kerjasama dengan pihak swasta dalam sistem perencanaan dan pengkajian potensi ekonomi;
6. Mencari dan Menjadikan kekuatan swasta sebagai salah satu pendorong pembangunan kota.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Samarinda?

### **Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan dan menganalisis Pelaksanaan Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kota Samarinda.

### **Manfaat Penelitian**

#### *1) Manfaat Teoritis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Samarinda dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda.

#### *2) Manfaat Yuridis*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi Pemerintah Daerah Kota Samarinda, khususnya pada Badan Perencanaan Pemerintah Daerah (Bappeda) Kota Samarinda dalam pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Samarinda.

### **Kerangka Dasar Teori**

#### ***Pengertian Perencanaan***

Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia. pekerjaan-pekerjaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Poewadarminta dalam Setiawan (2007:17) bahwa yang dimaksud dengan “rencana” dalam hal ini dapat diartikan sebagai rancangan (rangka sesuatu yang akan dikerjakan), misalnya rancangan-rancangan yang akan dilaksanakan,

rancangan sesuatu usaha (pembangunan dan sebagainya yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya, tidak lain adalah suatu proses persiapan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia (Tjokromodjojo, 2002:12).

Dalam melakukan perencanaan, seperti dikemukakan oleh Syamsi (2004:56), maka perencanaan yang baik dan lengkap haruslah memenuhi enam unsur pokok. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Apa (*what*), yakni mengenai materi kegiatan apa yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan;
- 2) Mengapa (*why*), yaitu alasan mengapa memilih dan menetapkan kegiatan tersebut dan mengapa diprioritaskan;
- 3) Bagaimana dan berapa (*how and how much*), yaitu mengenai cara dan teknis pelaksanaan yang bagaimana yang dibutuhkan untuk dilaksanakan dan dengan dana yang tersedia harus dipertimbangkan;
- 4) Dimana (*where*), yakni pemilihan tempat yang strategis untuk pelaksanaan kegiatan proyek;
- 5) Kapan (*when*), yaitu pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaannya;
- 6) Siapa (*who*), menentukan siapa orang yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. Ini merupakan subjek pelaksana. Kadang-kadang diperlukan juga untuk menentukan siapa yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan. Siapa disini merupakan Whom.

### ***Pengertian Pembangunan***

Kartasasmita dalam Riyadi dan Supriyadi (2004:4) menjelaskan secara sederhana yaitu pembangunan sebagai suatu proses kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sedangkan menurut Siagian dalam Riyadi dan Supriyadi (2004:6) menjelaskan pembangunan merupakan suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dalam pembangunan.

### ***Perencanaan Pembangunan***

Seperti yang dijelaskan oleh Tjokroamidjojo dalam Wrihatnolo dan Nugroho (2006:41) cirri-ciri perencanaan pembangunan diuraikan sebagai berikut :

- 1) Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap, hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif;

- 2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yang setelah dikurangi laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan perkapita;
- 3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang dapat mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur ekonomi berbasis industri;
- 4) Adanya perluasan kesempatan kerja;
- 5) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antar daerah;
- 6) Adanya usaha pembinaan ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan;
- 7) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional;
- 8) Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

### ***Pembangunan dalam Perspektif Paradigma Modernisasi***

Pembangunan berarti transformasi sosial dalam pengatur distribusi potensi social kepada semua orang seperti pendidikan, layanan kesehatan, perumahan rakyat, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, dan dimensi lain dari peluang kehidupan manusia. Saat pembangunan diartikan kemajuan yang berfokus pada transformasi psikologis dan social dalam masyarakat dan komunitas, pembangunan diartikan pertumbuhan yang melibatkan teknologi dan transformasi ekonomi. Pembangunan sebagai pertumbuhan berfokus pada prospek ekonomi. Di dalamnya termasuk transformasi struktur institusi untuk memfasilitasi kemajuan teknologi dan pergaikan dalam memproduksi dan pendistribusian pelayanan dan jasa.

Menurut Todaro (2002:12) pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2002:13) menambahkan bahwa pembangunan ekonomi suatu negara telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang.

### ***Badan Perencanaan Pembangunan Daerah***

Berdasarkan PERDA Nomor : 03 Tahun 2001, tentang Kedudukan BAPPEDA sebagai Lembaga Teknis di Bidang Perencanaan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2007, tentang Organisasi

Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor : 024 Tahun 2008, BAPPEDA Kota Samarinda merupakan :

1. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
2. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah, dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Disamping tugas dan fungsi BAPPEDA dalam bidang perencanaan pembangunan daerah, urusan lainnya yang ditangani berdasarkan peraturan perundangan seperti antara lain :

- a) Penyediaan data pokok daerah
- b) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- c) Pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban kepala daerah.
- d) Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD).
- e) Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten; dan
- f) Bidang-bidang strategis penyelenggaraan pemerintah daerah lainnya.

Berdasarkan ruang lingkup tugas (*scope of work*) di atas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah, yaitu :

- a) Pengambilan keputusan alokasi sumber daya pembangunan.
- b) Think tank (menyusun perencanaan pembangunan daerah)
- c) Koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah
- d) Administrator dalam pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah ( berdasarkan Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah).

### ***Tugas Pokok Bappeda***

- a. Mendukung dan membantu kelancaran tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, khususnya kegiatan penyusunan dan pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah ;
- c. Merumuskan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring perencanaan dan pengendalian daerah dibidang

perencanaan ekonomi, sosial budaya, fisik dan prasarana, serta evaluasi dan statistik.

### ***Tujuan Bappeda Kota Samarinda***

a. Misi Pertama

Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang mengarah ke Profesionalisme di Bidang Perencanaan Pembangunan dengan tujuan : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek/fungsional informal.

b. Misi Kedua

Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan dengan tujuan : Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, baik tingkat pemerintahan dan masyarakat.

c. Misi Ketiga

Menciptakan Koordinasi yang serasi dan terpadu dengan tujuan : Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

### ***Sasaran Bappeda***

a. Sasaran Pertama

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana melalui kursus jangka pendek, dengan sasaran: Tersedianya Sumber Daya Manusia bagi Aparat Perencana yang Profesional.

b. Sasaran Kedua

Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan dari semua lini, tingkatan Pemerintahan dan Masyarakat, dengan sasaran : Tersedianya Perencanaan Pro-aktif dan Antisipatif serta pelaksanaan pembangunan sesuai dengan skala prioritas.

c. Sasaran Ketiga

Meningkatkan Konsultasi dan Konfirmasi Program Pembangunan secara terpadu, baik antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional, dengan sasaran : Meningkatnya keterpaduan Program Pembangunan antar Instansi, Daerah, Regional dan Nasional.

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Moleong (2007 : 11) mengemukakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian penelitian ini diarahkan sesuai ruang lingkup penelitian yang ditetapkan adalah meliputi :

1. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan, meliputi :
  - a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
  - b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  - c. Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
  - d. Pengendalian dan Evaluasi RKPD
2. Faktor yang pendukung dan penghambat Bappeda dalam melaksanakan tugas dalam pembangunan

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda, yang mengambil lokasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Samarinda, dengan alamat Jl. Dahlia No. 81 Samarinda.

### **Jenis dan Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto (2006 : 129) sumber data adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. *Person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan informasi atau data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket/kuesioner.
2. *Place*, yaitu sumber data yang bisa menyajikan tampilan berupa keadaan diam atau bergerak.
3. *Paper*, yaitu sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data untuk penulisan skripsi ini.

1. Data Primer
  - a) *Key Informan* (informasi kunci) adalah informan yang berkompeten dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini yang menjadi key informan adalah Kepala Bappeda Kota Samarinda
  - b) *Informan* (informasi) adalah orang yang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai bidang-bidang yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.
2. Data Sekunder

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Moleong (2007:156) dapat dilakukan melalui tahapan-tahapan penelitian sebagai berikut :



1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*)
2. Ketika berada di lokasi penelitian (*Getting Along*)
3. Mengumpulkan data (*Logging The Data*)
  - a. Observasi,
  - b. Wawancara
  - c. Dokumentasi

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data yang digunakan disini adalah analisis data sesuai dengan yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, Michael Huberman dan Saldana (2014:33).

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan

### **Hasil Penelitian**

#### ***Tugas Bappeda dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah***

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Kota Samarinda Tahun 2015. Pengendalian dan evaluasi RKPD Kota Samarinda Tahun 2015 meliputi:

- a) Pengendalian kebijakan untuk menjamin bahwa RKPD Kota Samarinda telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Samarinda dan RKP Tahun 2015.
- b) Pengendalian pelaksanaan untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD Kota Samarinda telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2015.
- c) Evaluasi hasil dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Samarinda tahun 2015.

Pengendalian kebijakan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Kota Samarinda Tahun 2015. Pengendalian pelaksanaan dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015.

Dalam teknisnya dilapangan Bappeda Kota Samarinda menjalankan evaluasi sesuai dengan Renja masing-masing SKPD seluruh lingkup Kota Samarinda dan dilaksanakan setiap triwulannya bertempat di Kantor Bappeda Kota Samarinda. Dan dalam prakteknya masing-masing SKPD mengisi form capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, form capaian kinerja tersebut

dapat dilihat pada lampiran. Form masing-masing SKPD tersebut dikumpulkan dan dilaporkan ke Bappeda Kota Samarinda dan dilanjutkan pelaporan tersebut kepada Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan capaian pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penjelasan di atas kepala bidang Evaluasi dan Statistik Bapak H. Umar Shodiq, SE beliau menjelaskan bahwa:

*“... Dalam hal pengendalian dan evaluasi Bappeda sebagai pembina dan pengawasan sebagai penilai capaian pelaksanaan melalui administrasi dan monitoring langsung dilapangan berdasarkan melihat pengeluaran keuangan dengan implementasi pembangunan dilapangan.”*(hasil wawancara,10 Oktober 2015).

Hal yang sama juga di katakan oleh Staf Statistik dan Dokumentasi, Bapak Sofyan Agus, beliau mengatakan bahwa:

*“Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kota Samarinda secara berkelanjutan melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Dan melakukan tindak lanjut dari hasil pengendalian dan evaluasi guna mempercepat pembangunan daerah Kota Samarinda.”* (hasil wawancara,10 Oktober 2015).

Bappeda dalam perumusan kebijakan lebih di tekankan pada evaluasi tahapan pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, Evaluasi dilakukan berdasarkan pada pelaksanaan kegiatan dengan melakukan monitoring langsung yang dilaksanakan setiap bulan, per-3 bulan dan akhir tahun secara totalitas dengan melibatkan SKPD teknis dan Badan Keuangan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan *schedhule* yang direncanakan dengan capaian pelaksanaan melalui administrasi dan *monotiring* langsung di lapangan serta berdasarkan *unit price* dengan melihat pengeluaran keuangan dengan hasil di lapangan.

Selanjutnya pihak Bappeda melakukan Koordinasi berupa rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin dengan mulai dari tahapan pembuatan rancangan rencana, penetapan perencanaan, pembuatan rencana, pelaksanaan sampai pada evaluasi yang melibatkan SKPD-SKPD terkait pembangunan.

Kesuksesan Bappeda dalam menyelenggarakan sistem perencanaan pembangunan daerah adalah sama dengan keberhasilan pengelolaan kinerja daerah. Untuk mengetahui bahwa kinerja daerah telah berhasil dikelola dalam rangka penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah dibutuhkan sebagai indikator kinerja. Tanpa indikator kinerja, sulit menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan suatu kebijakan/program/kegiatan dan pada akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Tanpa indikator kinerja, sulit menentukan kewajaran belanja dan keadilan pagu anggaran antar SKPD atau antar kebijakan Tanpa indikator kinerja, perumusan prioritas pembangunan sulit ditentukan. Tanpa indikator kinerja, pengendalian dan evaluasi tidak dapat dilakukan dengan baik Dibutuhkan kejelasan antara indikator kinerja daerah dan perangkat daerah sebagai representasi tanggungjawab kinerja

kepala daerah dan kepala perangkat daerahh serta keterhubungan antara keduanya. (Yuwono. S. 2015)

Bedasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bappeda Kota Samarinda melakukan Evaluasi RKPD. Evaluasi RKPD yang dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, evaluasi ini menggunakan format yang baku berdasarkan data dari Renja masing-masing SKPD lingkup Kota Samarinda.

Dalam teknisnya dilapangan Bappeda menjalankan pengawasan sesuai dengan Renja masing-masing SKPD seluruh lingkup Kota Samarinda dan dilaksanakan setiap triwulannya bertempat di Kantor Bappeda Kota Samarinda. Dan dalam prakteknya masing-masing SKPD mengisi form capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014, form capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran. Form masing-masing SKPD tersebut dikumpulkan dan dilaporkan ke Bappeda Kota Samarinda dan dilanjutkan pelaporan tersebut kepada Provinsi Kalimantan Timur sebagai laporan capaian pembangunan kepada Pemerintah Pusat.

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 yang dilakukan Bappeda Kota Samarinda pada saat penelitian ini sudah sampai pada evaluasi Triwulan III tahun 2015. Hasil evaluasi RKPD Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel lampiran 9.

Bedasarkan tabel lampiran 9 diatas dapat kita lihat terdapat selisih antara program yang ada di Dokumen perencanaan RKPD dengan Dokumen Perencanaan RPJMD. Dari tabel lampiran 9 diatas maka dapat kita lihat capaian kinerja masing-masing program dibawah bidang urusan berdasarkan dokumen perencanaan.

Hasil data tersebut di dapatkan dari hasil evaluasi RKPD berdasarkan data Renja masing-masing SKPD lingkup Kota Samarinda yang di evaluasi oleh Bappeda Kota Samarinda. Dapat kita lihat hasil evaluasi RKPD yang dilakukan oleh Bappeda Kota Samarinda berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 dapat kita lihat di tabel lampiran 9.

Bappeda Kota Samarinda dalam melaksanakan evaluasi RKPD tahun 2015 telah dilaksanakan sampai triwulan 3, dari data diatas dapat kita lihat capaian kinerja pemerintah Kota Samarinda masih rendah dengan capaian kinerja sebesar 37,76. Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja melalui program wajib dan pilihan Kota Samarinda masih berjalan sangat lambat. Peran bappeda Kota Samarinda dalam mengawasi pembangunan daerah melalui evaluasi ini dapat memberikan hasil representatif tentang kinerja SKPD sebagai pemangku program wajib dan pilihan yang diamanatkan. Dalam hal tindak lanjut hasil pengendalian dan evaluasi Bappeda Kota Samarinda melaporkan hasil capaian kinerja kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan untuk mempercepat pembangunan daerah Kota Samarinda dab sebagai evaluasi kinerja SKPD lingkup Kota Samarinda.

Bedasarkan data dan hasil penelitian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Bappeda Kota Samarinda wajib memberikan masukan kepada Kepala

Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan daerah yang bersifat prioritas. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut seharusnya dapat memberikan kebijakan dan keputusan dalam mempercepat pembangunan daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk mengawasi kemajuan pembangunan daerah dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bisa dilihat sebagai keberhasilan Pemimpin Daerah dalam mengawal pembangunan Daerah yang telah ditetapkan pada visi misi yang telah di tuangkan dalam dokumen perencanaan.

### ***Faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Pembangunan***

#### ***Faktor Pendukung***

Identifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat bermanfaat bagi keberhasilan pencapaian kinerja dan daya serap anggaran antara lain karena:

1. Lebih dini diketahui hal-hal yang mempengaruhi pencapaian target di akhir tahun anggaran sehingga dapat diambil langkah-langkah untuk perbaikan dan penyempurnaan.
2. Serapan anggaran dapat dioptimalkan untuk menjadikan APBD sebagai penggerak perekonomian daerah yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
3. Mempermudah pengkajian dan analisa tingkat capaian dan daya serap sehingga meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan efisiensi anggaran.
4. Perencanaan tahap berikutnya memiliki data dan informasi yang akurat, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan efisien.

Terdapat faktor yang mendukung Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Samarinda. Terkait dengan faktor pendukung penulis melakukan wawancara dengan Staf Statistik dan Dokumentasi, Bapak Sofyan Agus, beliau menjelaskan:

*‘.....menurut pendapat saya yang menjadi faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan di Kota Samarinda tidak lepas dari komitmen dari seluruh jajaran Bappeda Samarinda untuk memperbaiki dan membenahi kualitas perencanaan, dan koordinasi yang baik antara Bappeda dan SKPD lingkup Kota Samarinda ’.* (Hasil wawancara,10 oktober 2015).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Samarinda , yaitu :

- a. Komitmen dan dukungan yang kuat dari pimpinan pemerintah Kota Samarinda untuk memperbaiki, membenahi dan menyelesaikan dokumen perencanaan.
- b. SDM yang dapat bekerja maksimal dalam penyusunan perencanaan pembangunan Kota Samarinda .

- c. Koordinasi yang baik antara Bappeda Kota Samarinda dan SKPD lingkup Kota Samarinda dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan Kota Samarinda. (Hasil Wawancara dengan Informan, 10 Oktober 2015)

#### *Faktor Penghambat*

Menurut Kepala BAPPEDA Kota Samarinda yang diwawancarai, mengatakan bahwa hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan BAPPEDA Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Tidak lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan Kota Samarinda, dalam hal ini dokumen RPJMD (2010-2015) yang belum terselesaikan.
2. Adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Samarinda, seperti usulan DPRD yang tidak sesuai hasil Musrenbang, unsur politis, dan lain-lain.
3. Kurangnya keterlibatan pihak aparatur pegawai negeri dan masyarakat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Berdasarkan data diatas diyakinkan dengan hasil wawancara dilapangan terkait dengan faktor penghambat dalam melaksanakan Peran BAPPEDA, diperjelas dengan hasil wawancara oleh Staf Subbag Perencanaan Program, Ibu Sari Astarini S.Pd, menyatakan bahwa:

*“.. menurut saya faktor penghambat penyusunan antara lain tidak adanya atau belum lengkapnya dokumen perencanaan pembangunan Kota Samarinda, dalam hal ini RPJMD yang mana dokumen ini adalah pedoman Bappeda Kota Samarinda dalam menyelesaikan dokumen RKPD yang juga merupakan arah pembangunan Kota Samarinda kedepannya ” (hasil wawancara, 10 Oktober 2015).*

#### **Kesimpulan**

1. RPJPD Kota Samarinda yang seharusnya selesai pada sebelum tahun 2005 kenyataan dilapangan ternyata dokumen perencanaan ini baru terselesaikan di tahun 2015, hal ini sangat mempengaruhi arah pembangunan di Kota Samarinda
2. Bappeda Kota Samarinda sampai saat ini belum menyelesaikan dokumen RPJMD Kota Samarinda. dengan ini Bappeda Kota Samarinda akan menyelaraskan RPJMD Kota Samarinda sesuai dengan visi dan misi Walikota/Wakil Walikota terpilih di periode tahun 2016-2020.
3. RKPD Kota Samarinda tidak disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD Kota Samarinda, melainkan berdasar pada RPJM Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan berdasar atas prioritas utama pembangunan di Kota Samarinda serta yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Samarinda.
4. Bappeda Kota Samarinda seharusnya memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong pembangunan daerah yang bersifat

prioritas berdasarkan visi misi yang telah di tuangkan pada dokumen perencanaan.

### **Saran**

1. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kota Samarinda agar meningkatkan koordinasi dan menjalin komunikasi antar SKPD lingkup Kota Samarinda maupun Provinsi dan Instansi vertikal (BPS dan BPN) melalui *planning*, *monitoring* dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
2. Untuk penyusunan dokumen perencanaan baik RPJMD periode selanjutnya dan RKPD tahun berikutnya mengacu kepada RPJPD Kota Samarinda yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan yang ada.
3. Meningkatkan kesadaran dari Kepala Daerah akan pembangunan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat Kota Samarinda.
4. Dalam penyusunan program pembangunan di Kota Samarinda, Bappeda Kota Samarinda agar lebih memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas utama pembangunan dan terfokus pada permasalahan yang ada di Kota Samarinda.
5. Evaluasi yang dilakukan tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai peraturan yang berlaku.

### **Daftar Pustaka**

- Gani, J.Y., 2005, *Mengkaitkan Perencanaan Partisipatif dan Penganggaran Daerah, Disampaikan dalam Forum Regional FPPM "Perencanaan dan Penganggaran Daerah Partisipatif: refleksi dan kerangka kerja ke depan*, Lombok.
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications, Inc.
- Moleong, Lexy, J., (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Riyadi, Supriyadi B. Deddy. (2004), *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sadono Sukirno, (2002), *Beberapa Aspek Dalam Persoalan Pembaharuan Daerah*, Jakarta, Fakultas ekonomi Universitas Indonesia.
- Soekartawi, (2001), *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta : Raja Wali.
- Sugiyono, (2007), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sumaryadi. I. Nyoman, (2005), *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Citra Utama.
- Sutrisno Hadi, (2008), *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah & Penyusunan Skripsi*, Samarinda: QTs Print.
- Tarigan, Robinson, (2006), *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wrihatnolo. R. Randy, Nugroho. D. Riant. (2006), *Manajemen Pembangunan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Yuwono. Sony. (2015), *Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan SKPD Provinsi Kalimantan Timur: Dalam Rangka Penyampaian Evaluasi Indikator Kinerja Provinsi Kalimantan Timur*. Samarinda.

**Dokumen-dokumen:**

- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. 2015. *RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015*. Samarinda.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 *tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Peraturan Daerah Badan, Dinas, dan Kantor Kota Samarinda No 12 Tahun 2008: *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah*. 2008. Samarinda.
- Peraturan Walikota Samarinda No 024 Tahun 2008: *Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2008. Samarinda. BAPPEDA.
- Peraturan Daerah No 03 Tahun 2001: *Tentang Kedudukan BAPPEDA sebagai Lembaga Teknis di Bidang Perencanaan Daerah*. 2001. Samarinda.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 41 Tahun 2007. *Tentang Organisasi Perangkat Daerah*. 2007. Indonesia.
- Peraturan Walikota Samarinda No 024 Tahun 2008. *BAPPEDA Kota Samarinda*. 2008. Samarinda.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2013. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2013. Samarinda
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Samarinda 2011-2015. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2011. Samarinda.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Samarinda 2005-2025. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2005. Samarinda
- Rencana Kerja (RENJA) 2014. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2014. Samarinda.
- Rencana Strategis (RENSTRA) 2011-2015. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah*. 2011. Samarinda.
- Lakip BAPPEDA. 2012. *Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*. 2012. Samarinda.